

KONFLIK SOSIAL DITINJAU DARI SEGI STRUKTUR DAN FUNGSI

Oleh: Mulyadi

(Drs. M.S. Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM)

I. Pengantar

Dalam kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik” (Chandra, 1992; Lauer, 1993). Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang (2001) mempertanyakan “benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan?”, ternyata jawabnya “tidak”; dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam *International Encyclopaedia of The Social Sciences* Vol. 3 (halaman 236-241) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader, t.t.). Dengan

demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia (Chang, 2001).

Kehidupan sosial itu, kalau dicermati komponen utamanya adalah interaksi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antaranggota itu ditemukan berbagai tipe. Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: *cooperative* (kerjasama), *competition* (persaingan) dan *conflict* (pertikaian). Dalam kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif. Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah “apakah konflik itu erat hubungannya dengan struktur sosial, dan apa fungsi konflik itu bagi kehidupan sosial manusia?”.

II. Konflik Sosial dan Kaitannya dengan Struktur-Fungsi, Institusi Sosial serta Integrasi Keseimbangan

Kondisi kehidupan sosial tertentu kalau dikaitkan dengan konflik, tentunya tidak sederhana, karena setiap konflik antaranggota dalam kehidupan sosial itu tidak selalu bentuk dan sifatnya sama (misalnya ada konflik individual atau kelompok, konflik terpendam atau terbuka, dan lain-lain). Dengan demikian memang ada variasi

dalam konflik, baik atas dasar bentuk, sifat, penyebab terjadinya, maupun langkah penyelesaiannya.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa dalam persoalan konflik ini perlu diperhatikan konteks struktur dan fungsi dalam kehidupan sosial yang bersangkutan. Tipe struktur dan fungsi kehidupan sosial tertentu sebagai suatu unit entitas akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di situ.

2.1 Struktur

Peter M. Blau (1977) menyatakan bahwa struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan di antara mereka (termasuk di dalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketidaksamaan atau keberagaman antarbagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antarbagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama. Selanjutnya Blau mengelompokkan basis parameter pembedaan struktur menjadi dua, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas, seperti agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas, dan sebagainya. Kalau dicermati, pengelompokan ini bersifat horisontal, dan akan melahirkan berbagai “golongan”. Adapun parameter gradual membagi komunitas ke dalam kelompok sosial atas dasar peringkat status yang menciptakan perbedaan kelas, seperti pendidikan, pendapatan,

kekayaan, prestise, kekuasaan, kewibawaan, inteligensia, dan sebagainya. Jadi pengelompokan ini bersifat vertikal, yang akan melahirkan berbagai “lapisan” .

Atas dasar struktur sosial yang dikemukakan Blau di atas, dapat disebutkan bahwa interaksi antarbagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi antarkelompok, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual; bahkan tidak hanya secara internal tetapi dapat juga secara eksternal. Interaksi antarbagian dalam kehidupan sosial, atas dasar parameter nominal atau gradual dapat menimbulkan konflik antarindividu anggota dari berbagai “golongan” dan “lapisan” tadi. Sementara itu, Menurut Dahrendorf (1986), konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari sudut struktur sosial setempat (Dahrendorf, 1986; Simanjuntak, 1994).

2.2 Fungsi

Berdasar konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan bahwa sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (*adaptation*). Berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (*goal attainment*). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (*integration*). Tampaknya apa yang dikemukakan Parsons itu cukup relevan untuk dipakai sebagai salah satu dasar dalam menganalisis secara struktural dan fungsional konflik lokal; dan atas dasar konsep Parsons ini pengetahuan

mengenai konflik sosial akan lebih memadai. Sehubungan dengan itu Coser (t.t.) menyatakan bahwa konflik adalah suatu komponen penting dalam setiap interaksi sosial. Oleh karena itu menurut Coser (1974) konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Dengan kata lain konflik dapat menyumbang banyak bagi kelestarian kehidupan sosial, bahkan mempererat hubungan antaranggota.

Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya sekedar berkait dengan hal peran. Relasi fungsi tidak selalu terpadu (integratif) karena dapat saja relasi yang saling konflik, lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi. Dalam fungsi terdapat struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur dan fungsi yang saling terkait erat (kalau tanpa kaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas menyangkut hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja, dan kurang mampu melihat potensi-potensi konflik yang mungkin ada (Brown, 1980). Pencampuran teori ini dengan teori perubahan baru muncul kemudian. Berbicara khusus tentang perubahan, umumnya menyangkut perilaku, inipun memerlukan waktu yang panjang. Hanya perubahan yang radikal yang dapat mengubah struktur dan fungsi.

2.3 Institusi sosial dan kaitannya dengan struktur dan fungsi

Bronislaw Malinowski dalam membuat deskripsi etnografi, sedapat mungkin menerapkan teori fungsional, meskipun tidak semuanya berhasil. Menurutnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan secara individual, tetapi melalui kehidupan

bersama (sosial) secara terorganisasi atau tertata dalam hukum atau nilai-nilai tertentu. Sehubungan dengan itu, tujuan akhir yang akan mereka capai adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengenai tujuan-tujuan ini akan dicapai atas dasar nilai-nilai umum yang berlaku. Semua ini menurut Malinowski disebut *charter*, yang diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisasi tentang aktivitas-aktivitas sosial yang penuh tujuan (yang didasarkan atas nilai umum dan kesepakatan bersama). Sistem nilai dan tujuan bersama ini dapat diartikulasikan secara lebih kongkret menjadi norma. Prinsip-prinsip integrasi akan tercermin dalam institusi sosial, dan inilah *basic-needs* manusia. Prinsip-prinsip integrasi ini merupakan bagian dari *basic-needs* itu sendiri. Sementara itu responnya adalah kebudayaan yang diwujudkan dalam pembentukan institusi-institusi sosial. Kebudayaan sebagai respon *basic-needs* dapat diindikasikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, sehingga memuaskan *basic-needs* tersebut (Malinowski, 1960; Brown, 1980).

Radcliffe Brown dengan pendekatan antropologi-sosialnya ternyata seperti metode yang diterapkan dalam ilmu alam atau fisika. Dengan pendekatan komparasi untuk memperoleh pemahaman tentang keseluruhan komunitas. Adapun hal yang dikomparasikan adalah struktur keseluruhan komunitas dan bukan bagian-bagian. Dalam hal ini sebenarnya Brown mengadopsi apa yang pernah dikerjakan oleh E. Durkheim, sebelum akhirnya berubah ke pendekatan analisis struktural. Fungsionalisme bagi Brown untuk membentuk suatu struktur sosial dalam konteks masa kini (tanpa menggunakan fakta historis, karena dianggap tidak terlalu berguna). Hal yang ditekankan adalah proses yang berkaitan dengan adaptasi pada masyarakat atau komunitas yang diteliti itu sendiri (Brown, 1980). Mengenai konsep “institusi” dikenal

perbedaan pendekatan antara Brown dengan Malinowski. Brown menganggap komunitas sebagai keutuhan lebih berarti daripada sebagai bagian-bagian yang dikumpulkan. Sementara itu menurut Malinowski institusi terbentuk bukan karena *basic needs* komunitas, tetapi pemenuhan *basic-needs* individu; karena pemenuhan kebutuhan tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (jadi diperlukan keberadaan orang lain). Sehubungan perlunya keberadaan orang lain, Firth (1963) menyatakan: “*a human community is a body of people sharing in common activities and bound by multiple relationships in such a way that the aims of any individual can be achieved only by participation in action with others*”.

2.4 Integrasi keseimbangan dan konflik sosial

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Malinowski dan Brown mengajukan teori integrasi keseimbangan dan keharmonisan sosial, sedangkan konflik mengacu pertentangan dalam komunitas menuju perpecahan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kalau integrasi dan konflik (dua hal yang saling bertolak belakang) senantiasa ada dalam kehidupan sosial, lalu bagaimana keterkaitan antar keduanya, paling tidak apa fungsi konflik bagi kehidupan sosial yang bersangkutan.

Menurut van Baal (1988) konflik adalah produk kebudayaan, dan kebudayaan adalah produk dari struktur sosial. Logika hubungannya adalah menempatkan konflik sebagai produk dari struktur sosial. Melalui pengetahuan ada-tidaknya hubungan struktural dan fungsional dalam kehidupan sosial, akan memudahkan penyelesaian kasus konflik yang selalu atau akan selalu terjadi di dalamnya.

Fakta sosial menurut Emile Durkheim bukan sekedar apa yang dapat dilihat, tetapi juga apa yang ada di dalamnya yang tidak dapat dilihat. Semua gejala sosial seharusnya difahami sebagai hasil dari sikap dan perilaku manusia secara individual. Faktor sikap dan perilaku para individu ini yang menggambarkan keberadaan suatu kehidupan sosial. Fakta sosial (termasuk faktor kebudayaan di dalamnya)-lah yang mengendalikan individu, dan bukan individu yang mengatur kehidupan sosial. Dalam hal ini fakta sosial terbentuk secara alami dan posisinya eksternal. Eksternal yang dimaksud di sini adalah dalam posisi sebagai pengendali pada diri individu dalam kehidupan bersama.

III. Pendekatan Struktural-Fungsional terhadap Konflik: Upaya Memahami Penyebab dan Penyelesaian Konflik Sosial

Pendekatan terhadap konflik dapat diterapkan dengan memperhatikan aspek-aspek struktural dan fungsional dari kehidupan sosial setempat. Pendekatan struktural-fungsional ini sudah berkembang sejak lama dalam studi Antropologi dan Sosiologi. Berkait dengan pendekatan struktural-fungsional ini diperhatikan secara khusus nama Bronislaw Malinowski dan Radcliffe Brown dan yang kemudian diikuti antara lain oleh Talcott Parsons dan Lewis A. Coser yang pernah melakukan analisis konflik dengan pendekatan fungsional (Johnson, 1990). Konsep fungsi juga melibatkan struktur yang terjadi dalam satu rangkaian hubungan di antara kesatuan entitas, di mana bertahannya struktur didukung oleh proses kehidupan yang terjadi dalam aktivitas kesatuan yang terdapat di dalamnya (Brown, 1980). Selanjutnya dikemuka-

kan bahwa tiap-tiap persoalan dalam kehidupan setiap komunitas itu mempunyai fungsi.

Pada hakikatnya konflik sebagai salah satu bentuk interaksi antaranggota dalam kehidupan sosial telah ada sejak manusia hidup bersama. Beberapa contoh variasi penyebab terjadinya konflik, meskipun tidak dari awal, dapat dikemukakan sebagai berikut. Sejak jaman kolonial telah terjadi kecenderungan pemusatan pemilikan dan penguasaan atas tanah pertanian oleh petani lapisan atas di pedesaan. Dengan kata lain, bagian terbesar tanah pertanian dikuasai oleh sejumlah kecil petani, yakni petani lapisan atas tadi. Sebaliknya petani lapisan bawah hanya menguasai sebagian kecil tanah pertanian yang ada di suatu desa tertentu. Polarisasi tanah seperti itu telah menyebabkan terjadinya polarisasi sosial, yaitu proses perenggangan dan pertentangan antarlapisan sosial di pedesaan (Amaluddin, 1987), yang pada gilirannya akan menjadi penyebab timbulnya konflik sosial.

Belakangan ini, kemajuan dalam bidang komunikasi juga berdampak sama pesat bagi warga kota dan komunitas pedesaan. Pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi bagi warga komunitas pedesaan umumnya cenderung mempertahankan tata nilai tradisional di satu pihak dan cenderung meninggalkan tata nilai tersebut di pihak yang lain. Sebab efek dari hilangnya isolasi komunitas desa dengan dunia luar adalah terganggunya ciri-ciri kehidupan komunitas desa yang murni, bersamaan dengan berkembangnya anggota komunitas desa itu sendiri (Leibo, 1995). Para anggota generasi tua cenderung berada pada kelompok yang mempertahankan tata nilai tradisional, sedangkan generasi muda berada pada kelompok yang berlawanan. Batasan mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh pun mulai dipertentangkan.

Perbedaan pandangan antara dua generasi ini akan menimbulkan kesenjangan sosial dan keretakan budaya yang pada gilirannya akan bermuara pada kecemburuan sosial dan persinggungan budaya yang dapat berakibat fatal bagi keutuhan masyarakat (Depdikbud, 1993).

Laporan penelitian yang dibuat oleh Lembaga Penelitian Universitas Parahyangan pada tahun 1985-1986 mengenai adopsi teknologi baru khususnya traktor tangan dan dampak sosialnya di daerah pedesaan di Kabupaten Karawang dan Kendal, juga menunjukkan bahwa perbedaan penghasilan antara petani pemilik tanah dengan buruh tani. Hal ini mengakibatkan adopsi teknologi baru hanya dapat dilakukan oleh petani pemilik tanah, dan hal ini menyebabkan makin renggangnya hubungan sosial di antara mereka (Hofstede, 1994). Kondisi seperti itu oleh Rogers disebut sebagai *mutual distrust interpersonal relations*, yaitu adanya rasa ketidakpercayaan timbal-balik antara petani satu terhadap yang lain (Leibo, 1995). Ini dapat terjadi karena sesama anggota komunitas dalam memenuhi kebutuhan, mereka harus memperebutkan sumber-sumber yang sangat terbatas. Tanah sebagai sumber usaha tani terbatas, sementara pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan disertai pula dengan pekerjaan di bidang pertanian tidak mendatangkan keuntungan yang memadai. Kondisi semacam inilah yang menyebabkan terjadinya kompetisi di bidang ekonomi. Kalau persaingan itu meningkat dengan disertai munculnya individualisme petani, maka pasti akan mengganggu integritas sosial yang pada gilirannya tercermin dalam rendahnya derajat solidaritas sosial di antara mereka.

Menurut para ahli mengenai sebab-sebab terjadinya konflik di kalangan orang Batak, pada umumnya diakibatkan oleh sakit hati di antara sesama penduduk,

perbedaan pandangan dalam proses pelaksanaan adat, dan karena perebutan harta warisan (Simanjuntak, 1994). Namun selain itu masih ada konflik yang disebabkan oleh persoalan hutang-piutang dan karena biaya pelaksanaan adat yang dirasakan tidak adil atau amat memberatkan. Ada pula konflik yang disebabkan oleh penculikan (termasuk yang berkaitan dengan perkawinan), oleh penghinaan yang dianggap menjatuhkan martabat, dan oleh permasalahan kepemilikan tanah.

Upaya pencegahan untuk tidak terlalu banyaknya kasus konflik dalam suatu komunitas, adalah membuat warga menghormati dan mematuhi peraturan. Selain itu penanaman rasa takut akan balas dendam adalah alat pemaksa bagi warga komunitas untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Satu bentuk penyelesaian konflik seperti yang dikenal di kalangan orang Ifugao (Filipina) adalah berperannya tokoh penengah. Cara pemanfaatan peran penengah ini dianggap sebagai langkah pertama dalam upaya penyelesaian konflik secara lebih terorganisasi (van Baal, 1988).

Guna melengkapi pembicaraan tentang “rahasia” konflik dalam suatu kehidupan sosial (termasuk penyebab dan cara penyelesaian konflik), berikut ini dikemukakan pandangan ilmuwan lain yang merupakan angkatan yang lebih muda tetapi pandangannya lebih tajam dalam melihat gejala-gejala sosial, terutama yang berkait dengan persoalan konflik. Ilmuwan yang dimaksud ialah Edmund R. Leach dan Max Gluckman. Keduanya memang tidak berada dalam alur pemikiran yang sama, namun mereka memiliki cara pandang yang sama dan bersama-sama tertarik terhadap masalah konflik norma dan manipulasi aturan. Mereka juga sama-sama menganalisis tentang keseimbangan atau equilibrium dalam kehidupan sosial. Terhadap equilibrium

dalam kehidupan sosial dinyatakan terjadi tidak sepanjang masa, dalam arti sewaktu-waktu pasti akan terjadi disequilibrium atau kegoncangan sosial (Kuper, 1996).

Berbicara tentang *interest*, keduanya menyatakan bahwa memanipulasi norma adalah untuk kepentingan politik dan akan terjadi benturan atau konflik, yang diawali dengan konflik norma dan konflik interes, dengan tema sentral memperebutkan kekuasaan. Dalam hal ini terjadi pensiasatan norma atau aturan. Dalam analisis, keduanya juga menggunakan pendekatan historis, seperti “apakah konflik itu memiliki akar sejarah atau tidak”. Menurut keduanya pula, dengan mensiasati norma tadi akan membuat potensial terjadinya benturan-benturan yang semakin meningkat. Selanjutnya E.R. Leach dan Max Gluckman tidak hanya mempersoalkan tentang norma yang ambigu, tetapi norma-norma yang saling melengkapi dan terpadupun dapat terjadi saling bertentangan. Hal ini disebabkan tidak hanya oleh komunitas atau kehidupan sosial itu sendiri yang kompleks, tetapi juga terjadinya pertemuan budaya yang didasari oleh kepercayaan agama dengan perangkatnya sendiri-sendiri yang dapat berbenturan dengan norma yang sudah ada.

Sehubungan dengan beberapa anggapan berdua (Leach dan Gluckman) di atas, akan dipakai sebagai dasar di dalam menjawab pertanyaan: “apakah konflik norma dan konflik interes yang mengawali konflik yang lebih besar”, dan “apakah praktek pensiasatan atau manipulasi norma benar-benar mengawali terjadinya konflik sosial”.

Khusus E.R. Leach, sebagai pewaris strukturalisme Malinowski menganut faham empirisme dengan partisipasi. Satu hal yang penting yang dinyatakan Leach berkaitan dengan persoalan konflik adalah bahwa individu anggota kehidupna sosial sering membuat siasat-siasat atau manipulasi terhadap norma-norma sosial. Dengan

kata lain individu-individu dalam kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka banyak yang menempuh cara mensiasati atau memanipulasi norma-norma yang berlaku demi keuntungannya sendiri, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, guna mengakumulasi kekuasaan (dalam hal ini sentralnya ada pada bidang politik, sedangkan bidang ekonomi mengikutinya).

Pandangan besar Leach tampak dari kritiknya terhadap equilibrium. Menurutnya keseimbangan sosial itu umumnya tidak dapat dipertahankan secara kekal, artinya kepaduan sosial tidak berlangsung lama dan tidak konstan. Kehidupan sosial selalu dalam keadaan fluktuatif, bahkan senantiasa bergeser atau terjadi oskilasi secara terus-menerus. Dengan kata lain menurut Leach kehidupan sosial itu selalu dalam keadaan *inconsistency*. Adapun penyebabnya antara lain oleh kehidupan sosial itu memang tidak pernah stabil dan norma-norma sosial umumnya bersifat ambigu yang dilandasi oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan mempengaruhi interpretasi atas dasar perspektif yang berbeda dan akhirnya akan menentukan sikap yang berbeda-beda pula. Menurut Leach perbedaan sikap ini akan memunculkan benturan-benturan, baik secara individual maupun kelompok. Mekanisme perubahan ditentukan oleh respon individu dalam memperjuangkan posisi sosial politik serta kepentingan ekonomi. Menurut Leach, semua masyarakat hanya mempertahankan keseimbangan kritis untuk sementara, dan benar-benar “berada dalam keadaan berubah atau potensi yang berubah terus-menerus”. Norma-norma yang ada tidak stabil atau kaku. “Tidak pernah ada konformitas mutlak terhadap norma kebudayaan, sebenarnya norma itu sendiri hanya ada sebagai stres dari kepentingan yang berkonflik dengan keanekaragaman sikap” (Kuper, 1996).

Selanjutnya Leach mengajukan dua perspektif analisis, yakni: (1) model analisis idealistik yakni seperti kepaduan yang diidealkan oleh warga di mana individu-individu saling menafsirkan pandangan yang kurang-lebih sama dan berperilaku kurang-lebih juga sama; dan (2) model yang berjalan seperti realita yakni seperti apa yang terjadi dalam kehidupan sosial yang kongkret. Dalam hal ini terkandung makna bagaimana warga komunitas bersikap terhadap pihak lain, dan bagaimana warga berperilaku, termasuk bagaimana warga memanipulasi norma. Khusus dalam memanipulasi norma, akan terjadi benturan atau konflik dan bagaimana diselesaikannya konflik itu. Secara ringkas kedua perspektif analisis yang saling berbeda itu dapat dirumuskan: “di bawah upaya formalisasi berlakunya aturan-aturan, agar masyarakat mencapai tingkat kepaduan yang diinginkan, terletak realita di mana individu-individu berperilaku yang kadang-kadang mensiasati aturan untuk mengejar kekuasaan”. Di dalam realita inilah kajian Leach dilakukan, di mana masyarakat selalu mengalami oskilasi yang berakibat terjadinya perubahan sikap, dan akhirnya akan muncul kompetisi yang terus-menerus di antara warga selaku aktor. Mensiasati norma ini dalam arti untuk mencapai pilihan yang paling efektif, dan seringkali memunculkan perilaku-perilaku yang potensial untuk menimbulkan konflik sosial.

Max Gluckman memiliki alur teoretik aliran Universitas Oxford (seperti Brown), menyatakan bahwa equilibrium terbentuk untuk mengarah ke konflik, dan equilibrium itu dianggap bersifat sementara, bahkan sering bersifat fiktif. Dalam kajian konflik, norma itu sering bersifat ambigu, dan sifat ambiguitas itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan siasat atau manipulasi norma itu mengakibatkan saling berbenturan, sehingga akan ada pihak yang mengambil oposisi segmentasi, di

mana benturan-benturan itu dinegosiasikan dan boleh jadi membuahkan kepaduan. Sehubungan dengan itu Gluckman menyatakan konflik sebagai sesuatu yang positif. Kepaduan tidak terwujud sepanjang masa, karena kelompok-kelompok sosial memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Gluckman integrasi atau kepaduan terwujud melalui proses keseimbangan oposisi-oposisi, dan proses itu berjalan secara dialektik dengan mekanisme:

T e s i s	A n t i t e s i s	S i n t e s i s
K o n f l i k	D i n e g o s i a s I k a n	K e p a d u a n

Gluckman melihat konflik tidak sekedar semacam kesatuan transenden yang diekspresikan, melainkan dalam ekspresi konflik masyarakat yang untuk sementara diredakan (Kuper, 1996). Analisis mendalam yang dibuat Gluckman mengenai suatu situasi sosial Zulu, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap mode konvensional penyajian bahan etnografi. Analisis ini memunculkan suatu teknik yang sangat cocok untuk mempelajari proses konflik dan penyelesaian konflik. Aliran yang diikuti Gluckman juga memiliki ciri analisis yang membahas oposisi struktural yang didefinisikan secara situasional, berkali-kali mengenyampingkan kepentingan bersama yang dianalisis pada komunitas pedesaan. Oleh Gluckman dinyatakan bahwa konflik adalah endemik dalam struktur sosial, tetapi mekanismenya berlangsung jika konflik itu sendiri ditekan sedemikian rupa sehingga menguatkan kesatuan kelompok lokal. Akhirnya Gluckman menyatakan bahwa ekspresi kepentingan mengandung benturan-benturan atau situasi konflik, kemudian dibuat keseimbangan sementara dengan negosiasi yang silih berganti.

IV. Penutup

Berbicara tentang struktur dan fungsi serta hubungannya dengan persoalan konflik, bukanlah sesuatu yang sederhana. Struktur maupun fungsi, dalam setiap kehidupan sosial manusia pada hakikatnya tidak seragam, artinya pada setiap *setting* kehidupan sosial mungkin mempunyai struktur dan fungsi masing-masing yang saling berbeda. Begitu pula halnya dengan konflik, tidak selalu sama, ada konflik individual ada konflik kelompok, ada konflik tertutup ada konflik terbuka, dan lain-lain. Namun sesuatu hal yang jelas, apapun bentuk konflik yang terjadi di suatu daerah tentunya perlu dianalisis dalam kedudukannya yang tidak dapat dilepaskan dari struktur dan fungsi yang ada pada komunitas yang bersangkutan. Dengan kata lain konflik tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang ada, dan konflik pada hakikatnya berfungsi bagi terciptanya integrasi kehidupan sosial.

Oleh karena itu upaya untuk studi mengenai persoalan konflik sosial ini, memerlukan kearifan dan kecermatan analisis tersendiri, baik dalam memilih cara pendekatan maupun tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, berbicara tentang konflik tidak terbatas pada proses terjadinya, melainkan juga perlu dipahami latar belakang penyebab terjadinya (kenyataannya sangat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, termasuk manusia sering mementingkan diri-sendiri dan berani memanipulasi norma demi keuntungan pribadinya), cara-cara penyelesaiannya (dalam hal inipun kenyataannya juga ada berbagai cara penyelesaian konflik, ada yang secara eksternal seperti melalui polisi atau pemerintah, dan ada yang secara internal yang

mendasarkan pada resolusi lokal), dan juga fungsi konflik itu bagi warga komunitas yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Blau, Peter M. 1977. *Inequality and Heterogenity*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Brown, A. R. Radcliffe. 1980. *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chandra, Robby I. 1992. *Konflik dalam hidup sehari-hari*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Chang, William. 2001. "Dimensi etis konflik sosial". Dalam *KOMPAS* Rabu 2 Februari 2001.
- Coser, Lewis A. 1974. "The Function of Social Conflict". Dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (eds.) *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta:LPFE-UI. Halaman: 225-231.
- _____ (t.t.). "Conflict: Social Aspect", dalam David L. Silla (ed.) *International Encyclopaedia of The Social Sciences*. Vol. 3. New York: The Macmillan Company & The Free Press. Halaman 232-236.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan). Yogyakarta: Rajawali.
- Depdikbud. 1993. *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah NTB*. Mataram: Depdikbud Propinsi NTB.
- Firth, Raymond. 1961. *Elements of Social Organization*. Boston: Beacon Press.
- Hofstede, W.M.F. 1994. *Pembangunan Masyarakat: Society in Transition*. Yogyakarta: Gama Press.
- Johnson, D.P. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka-tama.

- Kuper, Adam.1996. *Pokok dan Tokoh Antropologi* (terjemahan). Bhratara, Jakarta.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (terjemahan). Edisi kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Leibo, J. 1995. *Sosiologi Pedesaan:Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Malinowski, Bronislaw. 1960. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. New York: Oxford University Press.
- Nader, Laura. (t.t.). “Conflict: Anthropological Aspect”, dalam David L. Silla (ed.) *International Encyclopaedia of The Social Sciences*. Vol. 3. New York: The Macmillan Company & The Free Press. Halaman 236-241.
- Parsons, Talcot. 1951. *The Social System* New York: The Free Press.
- Simandjuntak, B.A. 1994. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- van Baal, J. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*. Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia.